

## II. TUJUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Pola Koordinasi

#### 1. Pengertian Pola

Menurut Soerjono Soekanto (1993:315), kata Pola (*pattern*) adalah standardisasi, pengulangan, organisasi atau arah dari perilaku. Selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Aryono Suyono, 1985:327).

Berdasarkan pengertian dari teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pola adalah sebuah sistem kerja untuk digunakan dalam menggambarkan suatu gejala/fenomena tertentu.

#### 2. Pengertian Koordinasi

Menurut T. Hani Handoko (1984 :195) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan peranan mereka dalam organisasi.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 294) Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat sebagai kegiatan atau unsure yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi satu yang satu semua kegiatan atau unsure itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan dan di sisi alin, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Masih menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 293)

Kata *coordination* berasal dari co- dan ordinare yang berarti to regulate. Dilihat dari pendekatan empiric, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling member informai dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak lain. Jika dilihat dari sudut normative, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelesaikan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan.

Koordinasi menurut Chung & Meggy (Dalam Husaini Usman, 2009:439)

Dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

Kemudian menurut Anonim ( Dalam Husaini Usman, 2009:439) Koordinasi adalah suatu system dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar intitusi-intitusi di masyarakat melaluikomunikasi

dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan system informasi manajemen dan teknologi informasi.

Sedangkan menurut Awaluddin Djamin (Dalam Malayu S.P. Hasibuan, 1986:86) menuliskan koordinasi adalah suatu usaha Kerjasama antar badan, instansi unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan Koordinasi adalah sebuah usaha untuk berkerjasama yang mengikat Antar badan atau instansi-instansi, antar proposal, atau personal dengan suatu badan tertentu dengan rangkaian kegiatan yang terarah untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

Seperti pengertian pola yang di jelaskan sebelumnya, pola yaitu suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Aryono Suyono, 1985:327).

Serta Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling member informai dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak lain.

Jadi dapat disimpulkan pola koordinasi adalah Suatu rangkaian kegiatan untuk mengetahui atau mendeskripsikan suatu gejala atau masalah yang di

lakukan oleh pihak yang sederajat atau bidang-bidang fungsional dalam suatu organisasi agar pencapaian tujuannya terarah.

### **3. Tujuan, Manfaat, dan Bentuk koordinasi**

Menurut Husaini Usman (2009:438) tujuan dan manfaat koordinasi

Antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan KISS (coordinator, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi)
2. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.
3. Agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidik yang sulit bergantung, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan akan pengoordinasian.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (2003:297) tujuan

koordinasi, yaitu:

1. Menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap salingresponsive-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerjayang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Kemudian menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 299) Bentuk Koordinasi

Diidentifikasi sebagai berikut :

1. Koordinasi waktu, koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan. Jika berurutan, bagaimana urutan-urutannya. Koordinasi ini dependen, kausal, dan sebangsanya.
2. Koordinasi Ruang, koordinasi ruang dapat diartikan sebagai Koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi Interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu
4. Koordinasi Fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu
5. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.
6. Koordinasi perencanaan, oleh James G. March dan Herbert A. Simon (1958) disebut *coordination by plan*, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antara unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen
7. Koordinasi Masukan-Balik, oleh March dan Simon disebut *Coordination by feedback*, yaitu koordinasi hasil control terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment, improvement, correction*.

Menurut James D. Thomson (Dalam T. Hani Handoko, 1984:196) ada

Tiga macam saling ketergantungan diantara satu-satuan organisasi,

yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu, bila satu-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada Pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu Hasil akhir.

2. Saling ketergantungan yang berurutan, dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu. Sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal-balik, merupakan hubungan memberi dan menerima satuan antar organisasi

#### 4. Syarat, prinsip, dan sifat dalam konsep koordinasi

Menurut Mulyo S.P Hasibuan (1986 : 88), menyebutkan empat syarat dalam koordinasi, yaitu:

- a. *Sense of cooperation* atau perasaan untuk bekerjasama
- b. *Rivalry* atau persaingan untuk mencapai kemajuan dan hasil yang baik
- c. *Team spirit* atau satu sama lain pada tiap bagian harus saling menghargai
- d. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai, umumnya akan menambah semangat dalam melaksanakan tugas ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sehingga akan dapat hasil yang baik.

Sedangkan prinsip utama dalam koordinasi menurut Pamuji (1982 : 40-41), adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Koordinasi adalah proses yang kontinu.
2. Koordinasi harus ditunjang dengan adanya pertemuan, diskusi, rapat atau *sharing* bersama-sama antar unit yang berkoordinasi.
3. Perbedaan-perbedaan, persoalan, dan masalah dalam Pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan harus dikemukakan secara terbuka dan harus segera ditemukan sarana-sarana pemecahan atau solusinya.

Sifat-sifat koordinasi (*coordination characteristics*) menurut Mulyo S.P. Hasibuan (1986:88), terdiri dari :

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran,
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.\

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1986 : 89-90), tipe atau pola koordinasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan serta pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit dan kesatuan-kesatuan yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) *Interdisciplinary*

*Interdisciplinary* ialah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit-unit yang satu dengan unit-unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

- 2) *Inter-related* ialah koordinasi badan (instansi) atau unit-unit yang fungsinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun saling bergantung atau mempunyai kaitan tugas dan kepentingan baik secara intern maupun ekstern. Hal yang paling penting dalam koordinasi ini, kedudukan atau level setiap unit atau instansi yang berkoordinasi adalah staraf atau sama levelnya.

## 5. Cara dan Indikator dalam Koordinasi

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1986:91), cara-cara mengadakan koordinasi dapat ditempuh dengan cara :

- a. Memberikan keterangan langsung dan bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
- b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.
- c. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain.
- d. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

Berdasarkan pendapat Talizudhuhu Ndraha (2002 : 297), koordinasi dalam proses manajemennya, dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi
  - a. Ada tidaknya informasi
  - b. Ada tidaknya alur informasi
  - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
  - a. Tingkat pengetahuan terhadap koordinasi
  - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi partisipan
  - a. Ada tidaknya penetapan jadwal
  - b. Ada tidaknya pejabat yang berwenang yang terlibat
  - c. Ada tidaknya ahli dari masing-masing bidang yang terlibat
4. Kesepakatan dan komitmen
  - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
  - b. Ada tidaknya pelaksanaan kesepakatan
5. Insentif koordinasi
  - a. Ada tidaknya penetapan sanksi
  - b. Ada tidaknya pemberian sanksi bagi yang melanggar kesepakatan
6. *Feedback* untuk proses koordinasi berikutnya
  - a. Ada tidaknya complain terhadap kesepakatan
  - b. Ada tidaknya evaluasi terhadap kesepakatan
  - c. Ada tidaknya perubahan kesepakatan



## **B. Tinjauan Tentang Konflik**

### **1. Pengertian Konflik**

Menurut Hugh Miall (2002:7), Konflik adalah aspek *intrinsic* dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial.

Masih menurut Hugh Miall (2002 : 8), konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Menurut Lewis Coser (dalam Novri Susan,2010 :7), konflik adalah unsure penting dalam kehidupan manusia.

Kemudian menurut Webster (dalam Novri Susan, 2010 :8), konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak.pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, konflik adalah sebuah pertikaian yang disebabkan perbedaan pendapat atau kepentingan seseorang atau kelompok masyarakat.

## 2. Pendekatan Konflik

Menurut Giddens (dalam Novri Susan, 2010:91-92) persoalan konflik dalam masyarakat juga mendapatkan perhatian dari para pengamat etnisitas dan ras sebagai satu kelompok identitas dan kepentingan mereka dalam struktur sosial. Analisis ini disebut pendekatan primordial yang melihat konflik sebagai akibat dari pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti identitas berbasis etnis dan keagamaan.

Menurut Isaacs (dalam Novri Susan, 2010:92) pendekatan konflik primordial melihat identitas etnis, budaya, ras agama, dll adalah kuat dan stabil tidak bisa diubah yang terbentuk melalui proses yang panjang sehingga hanya bisa hilang dalam waktu yang panjang pula.

## 3. Pemetaan Konflik

Menurut Fisher (2001:22), pemetaan merupakan konflik secara grafis menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.

Hugh Miall (2002 : 92), membuat panduan pemetaan konflik untuk melihat pihak-pihak yang bertikai dan persoalannya, yaitu :

1. Siapa yang menjadi inti pihak yang bertikai?
2. Apa yang menjadi persoalan konflik? Apa mungkin membedakan antara posisi, kepentingan (kepentingan materi, nilai, hubungan), dan kebutuhan?

3. Apa hubungan pihak-pihak yang bertikai? Apakah ada ketidak simetrisan kalitatif dan kuantitatif?
4. Apa persepsi penyebab sifat konflik diantara pihak-pihak yang bertikai?
5. Apa perilaku akhir-akhir ini pihak-pihak yang bertikai (apakah konflik ini dalam fase eskalasi atau fase deeskalasi)?
6. Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertikai?

Suatu model lain pemetaan konflik multidisipliner dikembangkan oleh sosiologi dari united nations-university for peace, amr abdalla, yaitu model SIPABIO (dalam hugh miall, 2002:98), SIPABIO adalah :

1. *Source* (sumber konflik). Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda. Jika kita kembali pada analisis sosiologi konflik, berbagai sumber konflik tersebut bisa muncul dari model hubungan social (analisis konstruksi social), nilai-nilai seperti identitas dan agama dan dominasi structural.
2. *Issues* (isu-isu). Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik.
3. *Parties* (pihak). Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang berhubungan langsung dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan pihak netral untuk menginterfensi konflik.
4. *Attitudes/feeling* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang memengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif dan negatif bagi konflik.
5. *Behavior* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindak social dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*
6. *Intervention* (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan social dari pihak netral yang di tujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian.
7. *Outcome* (hasil akhir). *Outcome* adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi.

#### 4. Tata Kelola Konflik

Menurut Moore (Dalam Novri Susam, 2010 : 177), ada beberapa bentuk dan proses pengelolaan konflik, yaitu:

1. *Avoidance*, pihak-pihak yang berkonflik saling menghindari dan mengharapkan konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya
2. *Informal Problem solving*, pihak-pihak berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.
3. *Negotiation*, ketika konflik masih terus berlanjut maka para Pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya, mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari Negosiasi bersifat procedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi .
4. *Mediation*, munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua belah pihak karena dipandang bias membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.
5. *Executive dispute resolution approach*, kemunculan pihak lain yang member suatu bentuk penyelesaian konflik.
6. *Arbitration*, suatu proses tanpa paksaan dari para pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparial.
7. *Judicial approach*, terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.
8. *Legislative approach*, intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini.
9. *Extra legal approach*, penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak memiliki oleh pihak lawan. Salah satu pihak bias memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan *nonviolence action dan violence*.

### C. Tinjauan Tentang Etnis Lampung Dan Bali

#### 1. Pengertian Etnis

Menurut Frederick Barth (1988), etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal usul, bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat dalam sistem nilai budaya. Berdasarkan pengertian diatas, etnis maupun sekumpulan orang yang masih berhubungan secara sistem budaya.

## 2. Pengertian Etnis Lampung

Menurut Sabaruddin SA (2012:13-14) bahwa asal usul kata Lampung dan penduduknya belum diketahui dengan pasti, karena tidak ada bukti-bukti peningkatan sejarah. Dengan demikian ada beberapa versi yang menjadi bahan pembicaraan para ahli peneliti, pertama beberapa penduduk diceritakan bahwa kata Lampung berasal dari bahasa Lampung asli, yaitu anjak Lampung (dari atas), maksudnya penduduk yang datang dari atas dan menetap di daratan yang amat luas dan subur dengan bertani dan bercocok taman.

Untuk menyatakan bahwa nenek moyang orang Lampung berasal dari daerah pegunungan yaitu dataran tinggi belau kaki gunung Pesagi yang terletak di sebelah timur Danau Ranau, atau di hulu Way Semangka yang bermuara di Teluk Semangka-Kota Agung.

Berasal dari legenda Ompung Silamponga yang datang dari utara dikisahkan dalam legenda tersebut bahwa di zaman dahulu kala terjadi letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Banyak manusia yang jadi korban dan banyak pula yang berhasil menyelamatkan diri. Akibat dari letusan tersebut terjadilah sebuah danau yang sangat luas yang kini terkenal dengan Danau Toba di daerah Tapanuli (Tapanuli) di provinsi Sumatra Utara. Dari yang berhasil menyelamatkan diri tersebut, terdapat empat orang bersaudara yaitu Ompung Silitonga, Ompung Silamponga, Ompung Silaitoa, dan Ompung

Sitalanga. Dengan sebuah rakit mereka berlayar menyusuri pantai barat pulau swarna dwipa (sekarang sumatera)

Lama mereka mengembara dan berkali-kali mendarat dan menjalani pantai dan hutan guna mencari makan dan kemudian kembali berlayar setelah mereka memperolehnya. Merasa bosan terkatung-katung dilaut mereka memutuskan menetap didarat. Dalam keadaan sakit dan mengurangi beban, Ompung silamponga mereka hanyutkan kembali ke laut dan saudaranya yang lain tidak melanjutkan pengembaraannya. Suatu saat Ompung Silamponga terjaga dari tidurnya karena rakitnya terdampar dipantai dan kemudian hari dikenal dengan pantai Krui di Sekala Berak. Merasa badannya sudah sehat Ia memutuskan untuk menetap disana, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia bercocok tanam dan bertani.

Tertarik oleh keindahan pemandangan menjulang disekitarnya, Ompung Silamponga mendaki ke atas. Dari ketinggian dilihatnya hamparan dataran yang luas dibawahnya. Dalam keadaan kegembiraan yang sangat Ia berteriak “Lapping..Lapping..”, yang dalam bahasa batak berarti daerah dataran luas. Akhirnya Ompung Silamponga menetap di dataran yang disebutnya Lapping dan berbaur dengan penduduk asli yang ditemuinya.

Sampai sekarang di daerah Krui dan sekitarnya (Lampung Barat) dan beberapa daerah pedalaman lainnya. Kata lapping masih dipakai untuk

menyebut lampung. Contoh Ulun Lapping (Orang Lampung ) penduduknya disebut orang tumi (Buay Tumi).

Kemudian Residen Lampung I (1829-1834) menyatakan bahwa kata lampung berasal dari cerita rakyat yang turun temurun Poyang si Lampung. Diceritakan dalam sebuah kitab yang berjudul sejarah majapahit. Kitab tersebut ditemukan di daerah Lampung tahun 1818. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa Dewa Sanembahan dan Widodan Sinuhun mempunyai tiga orang anak yaitu “Si Jawa” ratu majapahit, “Si Pasundan” Ratu Padjajaran, “Si Lampung” Ratu Belalau. Si Lampung berkedudukan di daerah Sekala Barak di kaki gunung pesagi dan anak keturunnya tersebar di daerah Lampung yang sekarang termasuk daerah Ranau, Komering, sampai Kayu Agung sejak abad ke XV.

Prof. DR. Hilman Hadiksuma, SH ahli sejarah dan bahasa berasal dari kata cina, “to-hang p’ohwang” yang berarti orang lampung atau utusan dari lampung yaitu orang yang datang dari Negeri cina. Pada abad ke VII sejak saat itu daerahnya disebut lampung.

Prof. DR. Hilman Hadiksuma, SH. Ahli sejarah dan bahasa lampung, menghubungkan kata lampung dengan bekas kerajaan tulang bawang. Karena selain diartikan orang atau utusan lampung, to-hang p’ohwang bisa juga berarti tulang bawang.

Riwayat lama secara turun temurun dikalangan rakyat mengatakan bahwa cikal bakal sebagian besar orang lampung berasal dari sekal

berak. Sekala berak yaitu dataran tinggi gunung pesagi 2.262 meter di kecamatan Kenali (Belalau). Dengan demikian nenek moyang orang Lampung berasal dari bukit barisan abad XII atau sezaman dengan kerajaan Pagaruyung.

### **3. Pengertian Etnis Bali**

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil yang beribu kota Denpasar. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat seni terletak di Kabupaten Gianyar, sedangkan Kuta, Sanur, Seminyak, dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tempat tujuan pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan.

Suku bangsa Bali dibagi menjadi 2 yaitu : Bali Aga (Penduduk asli Bali biasa tinggal didaerah trunyan), dan Bali Mojopahit (Bali Hindu/Keturunan Bali Mojopahit).

Bali sebagian besar menggunakan bahasa Bali dan Bahasa Indonesia., sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga dan bahasa asing utama bagi masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan industri pariwisata.

Bahasa Bali dibagi menjadi 2 yaitu, bahasa Aga yaitu bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar, dan bahasa Bali Mojopahit. Yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus.

(<http://de-kill.blogspot.com/2009/sekilas-budaya-bali.html>. Tanggal 6 Juni 2012 pukul 08.05)



#### **D. Kerangka Pikir**

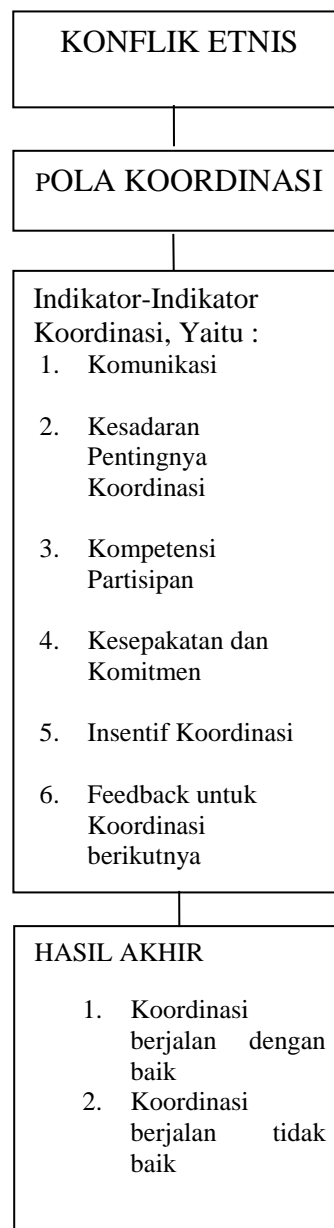
Bangsa Indonesia merupakan sebuah Negara yang multi etnis, dengan kondisi seperti ini tentunya menyimpan potensi besar timbulnya pertentangan antaretnis satu dengan etnis yang lain. Faktor Politis, Ekonomi, dan Primodialisme Kesukuan dapat melatarbelakangi timbulnya konflik antar etnis di negeri tercinta ini.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah Transmigran, ini membuat daerah Lampung menjadi daerah yang multi etnis. Warga nya terdiri dari Suku asli Lampung, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Aceh , Batak, dsb. Keadaan seperti ini tentunya dipertahankan sebagai keragaman suku bukan malah menjadi potensi konflik.

Menyatukan pemikiran, kebiasaan, perilaku dan sifat antara orang yang satu dengan orang yang lain atau suku yang satu dengan suku yang lain tentu tidak lah mudah. Apabila sampai terjadi perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak yan berbeda suku yang berujung pada konflik.

Dalam kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan antara etnis Lampung dan etnis Bali, dilakukan koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dengan Aparat Kepolisian Lampung Selatan. Koordinasi dalam proses manajemennya, dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Kesadaran Pentingnya koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
4. Kesepakatan dan komitmen
5. Insentif koordsinasi
6. *Feedback* untuk proses koordinasi berikutnya



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir